

ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2008 - 2012

Berlian Jawa Kesuma, Fitrie Arianti¹

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jalan Prof Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Financial Independence is the ability of a self-financed activities in the area of governance, development and service to the people who have paid taxes and levies as a source of local revenue needed. This research objective is to analyze the financial independence year 2008-2012 City of Bandar Lampung and analyze effectiveness financial year 2008-2012 City of Bandar Lampung.

These results indicate that the independence of the Fiscal Year 2008-2012 City of Bandar Lampung as measured by (1) Financial Independence ratio indicates that Bandar Lampung city is likely to have a very high financial dependence to central government or patterned instructive, viewed from the contribution of PAD is still not adequate to finance the construction of Bandar Lampung area and help the central government contribution is more dominant in local government activities. (2) The effectiveness ratio showed that the performance of the City of Bandar Lampung is very effective, judging from the target of the PAD always increasing and always be realized by both the budget each year

Bandar Lampung city has not been independent in the implementation of regional autonomy. Therefore, Bandar Lampung city should be optimized the factors that affect the ability of local governments in raising revenue, particularly the public participation factors, in addition to the City of Belfast also have more taxes to maintain a highly potential area and always make a major contribution to the Revenue The original area of each fiscal year, the Street Lighting Tax and Restaurant Tax, so that local needs can be met properly.

Keys Words: Financial Independence, The effectiveness ratio, Financial Independence ratio, and Realization

PENDAHULUAN

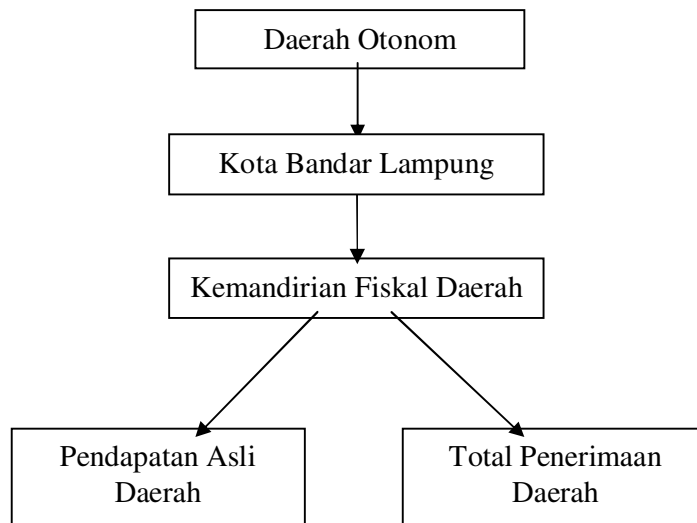
Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara otonom harus disertai dengan penguatan penerimaan fiskal daerah sebagai landasan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menuntut kepada setiap daerah untuk dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan dan pembiayaan daerah disamping dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Prinsip pemberian dana alokasi umum adalah untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dengan demikian pemberian dana alokasi umum tergantung dengan kapasitas fiskal daerah yang terlihat dari pendapatan asli daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dari kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri maka dengan pendapatan asli daerah akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri, sehingga dana alokasi umum kepada daerah tersebut akan semakin kecil.

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah dan kemandirian fiskal adalah pemerintah daerah harus bisa menjalankan rumah tangganya sendiri atau mandiri karena pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hak ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah (Kuncoro, 2004).

¹Corresponding author

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS



METODE PENELITIAN

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung rasio efektivitas dengan kemandirian keuangan daerah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menghitung rasio Kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100$$

2. Menghitung rasio Efektifitas berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat

kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Gambaran kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui beberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya di samping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata di dalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah.

Untuk melihat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat dapat dilakukan dengan mengukur kinerja atau kemampuan keuangan pemerintah daerah dan mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah. Dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung dengan menggunakan Analisis Rasio terhadap APBD pada tahun anggaran 2009 – 2012 , dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut :

4.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah

Tabel 4.1

Kemandirian Keuangan Kota Bandar Lampung

Tahun	Total PAD	Total Penerimaan	Persentase
2008	67,661,519,021	747,982,275,503	9,05 %
2009	70,432,264,168	793,492,316,672	8,88 %
2010	86,692,399,700	959,069,382,311	9,11 %
2011	162,818,119,556	1,187,871,504,156	13,80 %
2012	298,696,062,085	1,459,471,856,318	20,47 %

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2012

Rasio Kemandiran Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan}} \times 100$$

Rasio Kemandiran Kota Bandar Lampung tahun 2008 – 2012

$$\text{Tahun 2008} : \frac{67,661,519,021}{747,982,275,503} \times 100 = 9,05 \%$$

$$\text{Tahun 2009} : \frac{70,432,264,168}{793,492,316,672} \times 100 = 8,88 \%$$

$$\text{Tahun 2010} : \frac{86,692,399,700}{959,069,382,311} \times 100 = 9,11 \%$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2011} &: \frac{162,818,119,556}{1,187,871,504,156} \times 100 = 13,80 \% \\ \text{Tahun 2012} &: \frac{298,696,062,085}{1,459,471,856,318} \times 100 = 20,47 \%\end{aligned}$$

Melalui Perhitungan Rasio Kemandirian menunjukan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung selama periode 2008-2010 sangat rendah sekali atau bersifat instruktif. Pola hubungan instruktif artinya peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

a. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

b. Pola hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

d. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Tabel 4.2
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan / Ketergantungan Keuangan Daerah	Persentase	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	instruktif
Rendah	25%-50%	konsultatif
Sedang	50%-75%	partisipatif
Tinggi	75%-100%	delegatif

Sumber ; Nadeak, 2003;21

4.2.2 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan Target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.3
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Efektivitas (%)	Kriteria
2008	60.422.775.028	67.661.519.021	111,99 %	Sangat efektif
2009	69.909.309.841	70.432.264.168	100,75 %	Sangat efektif
2010	84.167.470.269	86.692.399.700	102,99 %	Sangat efektif
2011	156.796.491.183	162.818.119.556	103,85 %	Sangat efektif
2012	292.272.049.972	298.696.062.085	102,20 %	Sangat efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2012

Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 4.4
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas	Persentase (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber : Departemen Dalam Negeri

Perhitungan Rasio Efektivitas Kota Bandar Lampung dari tahun 2008 – 2012

Tahun 2008	:	$\frac{60,422,775,028}{67,661,519,021}$	x 100 =	111,99 %
Tahun 2009	:	$\frac{69,909,309,841}{70,432,264,168}$	x 100 =	100,75 %
Tahun 2010	:	$\frac{84,167,470,269}{86,692,399,700}$	x 100 =	102,99 %
Tahun 2011	:	$\frac{156,796,491,183}{162,818,119,556}$	x 100 =	103,85 %
Tahun 2012	:	$\frac{292,272,049,972}{298,696,062,085}$	x 100 =	102,20 %

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas menyatakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan sangat efektif. Realisasi nya setiap tahunnya dapat terealisasi telah mencapai lebih dari 100%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai analisis tingkat efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2008 -2012, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kota Bandar Lampung diketahui belum mampu sepenuhnya dalam melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Tingkat kemandirian fiskal Kota Bandar Lampung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sangat rendah. Dikarenakan Peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung selalu meningkat dari tahun 2008-2012, namun peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut tidak diimbangi dengan menurunnya bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan).

3. Kinerja pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung yang berdasarkan analisis rasio efektivitas adalah sangat efektif. Dikarenakan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah telah mencapai diatas 100%.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsini, 1998, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta : PT Rineka Cipta
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Gozali, A. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Birokrasi Ekonomi Sosial*. Pattimura,L. Pustaka LSKPI, Jakarta.
- Halim, Abdul.2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Embat. Jakarta
- Mardiasmo. 2004. *Bunga Rampai: Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah.*: Andi. Yogyakarta
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Nadeak, Ruslina. 2003. “*Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Sanata Dharma
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Siahaan P, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Steers, Richard M, Lyman W, Porter, Gregory A. Bigley, 1996. *Motivation and Leadership at Work*, McGraw-Hill International Edition.
- Tim Penyusun. 2008. *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Perpajakan, dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta : Salemba Empat.